PEMERINTAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH

RENCANA KERJA
(RENJA)
BADAN KEUANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN
2025

Untuk dipertimbangkan dan ditandatangani

Naskah Produk Hukum ini telah diproses melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai Timur dan teknis penyusunannya telah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
Borong, ... 2024

a.n. Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Manggarai Timur
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda,

KRISTIANUS UTOMO MAAL, SH
PENATA
NIP. 19830520 201212 1 002

a.n. Bupati Manggarai Timur
Sekretaris Daerah
u.b.
Asisten Administrasi Umum,

YOHANA F.K. MBAUT, S.Ikom
PEMBINA TK.I
NIP. 19730913 199212 2 002

Judul SK/Perbup	PD
RENCANA KERJA PARANGKAT DAERAH TAHUN 2025	BAPPEDA LITBANG

BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR 31.6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguna Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah bebera kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009- 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Manggarai Timur Nomor 103);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 171);
12. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2026 (Lembaran Daerah Kabupten Manggarai Timur Tahun 2023 Nomor 007).
13. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang di capai PD untuk Periode 1 (satu) tahun.
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
13. Indikatif adalah sesuatu yang masih bersifat dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil analisa, perhitungan, dan pembahasan serta tidak bersifat kaku.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD beserta Matrik Program Prioritas PD Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025 yang terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir 31 Desember 2025.

(2) Renja PD Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Renstra PD Tahun 2025–2026.

(3) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi:
   a. Salah satu bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara, khususnya program/kegiatan yang tercantum dalam RKPD Tahun 2025; dan
   b. Bahan bagi PD untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran Tahun 2025, setelah tercantum dalam KUA/PPAS.

(4) Penyusunan Renja PD merupakan tahapan lanjutan dari Penetapan RKPD.

(5) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilakukan verifikasi kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Target dengan RKPD Tahun 2025.

(6) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) Renja PD disusun dengan sistimatika sebagai berikut :
   a. Bab I Pendahuluan ;
   b. Bab II Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu ;
   c. Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
   d. Bab IV Rencana kerja dan Pendanaan PD ; dan
   e. Bab V Penutup.

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:
   a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar:
      1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ;
      2. Dinas Kesehatan ;
      3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;
      4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
      5. Satuan Polisi Pamong Praja ;
      6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
      7. Dinas Sosial.
   b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
      1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
      2. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
      3. Dinas Pangan dan Perikanan ;
      4. Dinas Pertanahan ;
      5. Dinas Lingkungan Hidup ;
      6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
      8. Dinas Perhubungan ;
      9. Dinas Komunikasi dan Informatika ;
      10. Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan Usaha Kecil dan Menengah ;
      11. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; dan
      12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

c. Urusan Pilihan
   1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ;
   2. Dinas Pertanian ; dan
   3. Dinas Peternakan.

d. Urusan Pendukung
   1. Sekretariat Daerah terdiri dari :
      a) Bagian Umum ;
      b) Bagian Ekonomi dan Administrasi Pembangunan ;
      c) Bagian Hukum ;
      d) Bagian Humas dan Komunikasi Pimpinan ;
      e) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;
      f) Bagian Organisasi ; dan
      g) Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

e. Urusan Penunjang
   1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ;
   2. Badan Keuangan Daerah ; dan
   3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

f. Urusan Pengawasan, yaitu Inspektorat Daerah.

g. Urusan Kewilayaan
   1. Kecamatan Borong ;
   2. Kecamatan Elar Selatan ;
   3. Kecamatan Sambi Rampas ;
   4. Kecamatan Congkar ;
   5. Kecamatan Rana Mese ;
   6. Kecamatan Lamba Leda Selatan ;
   7. Kecamatan Kota Komba ;
   8. Kecamatan Elar ;
   9. Kecamatan Kota Komba Utara ;
   10. Kecamatan Lamba Leda Timur ;
   11. Kecamatan Lamba Leda ; dan
   12. Kecamatan Lamba Leda Utara.

(3) Isi beserta uraian Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan urutan berdasarkan PD menurut urusan wajib dan pilihan ;

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 8 Juli 2024
Pj. BUPATI MANGGARAI TIMUR,

BONI HASUDUNGAN

Diundangkan di Borong
pada tanggal 8 Juli 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

REMIGIUS GONSA TOMBOR

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2024 NOMOR

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
BORONG

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR BKD.900/226 /II/ TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH ATAU YANG DISEBUT RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENJA 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah atau yang disebut Renja;

b. bahwa Penyusunan Renja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yaitu Penyusunan Renja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023 dan Renja Perubahan Tahun 2022;

c. bahwa Penyusunan Renja sebagaimana dimaksud dalam huruf b, harus dilakukan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional **(**Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4752);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata cara perubahan Rencana Pemabangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 09 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 159);

    1. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022 Nomor 50).

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 dan Renja Perubahan Tahun 2024 , sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat/ASN yang menduduki Jabatan dalam Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menyusun Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 dan Renja Perubahan Tahun 2024 secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan DPA Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai berakhirnya tahun anggaran 2024, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Borong

pada tanggal 9 Februari 2024

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Manggarai Timur

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH

Dr. ABDULLAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681003 199003 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : BK.900/226/II/ TAHUN 2024
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENJA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025 DAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

NOMOR	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Drs. ABDULLAH/ 19681003 198903 1 007	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	KETUA	Memberikan arahan, Melakukan pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan
2	FREDERIKUS NDENDONG, SE/ 19721004 200604 1 006	SEKRETARIS	WAKIL KETUA	Melakukan koordinasi seluruh kegiatan dan melaksankan tugas pelimpahan dari Ketua Tim
3	SOPHIA LEONARDO T.TASO, S.AB/ 19831009 201503 2 003	KASUBAG. KEPEGAWAIAN DAN UMUM	ANGGOTA	Mengumpulkan data – data dan referensi sesuai kebutuhan, serta memberikan dukungan teknis lainnya
4	AGUSTINUS MAKUNG, S.IP/ 19810919 200501 1 013	JF. PERENCANA AHLI MUDA	ANGGOTA	Mengumpulkan data – data dan referensi serta secara teknis menyusun Dokumen RENJA sesuai ketentuan yang berlaku
5	DEWI WIJAYANTI, SE/ 19860704 201903 2 007	PELAKSANA	ANGGOTA	Mengumpulkan data – data dan referensi sesuai kebutuhan, serta memberikan dukungan teknis lainnya
6	MELIANI LOMPENG/ 19940409 202012 2 015	PELAKSANA	ANGGOTA	Mengumpulkan data – data dan referensi sesuai kebutuhan, serta memberikan dukungan teknis lainnya
7	LOUIS OSVALDICO EMEN PANAR, SE	STAF	ANGGOTA	Membantu mengumpulkan data – data dan referensi sesuai kebutuhan, serta memberikan dukungan teknis lainnya

11	YOVITUS JELATU, SE	STAF	ANGGOTA	Membantu memberikan dukungan teknis kepada tim
12	YONSIANUS JUMAN	STAF	ANGGOTA	Membantu memberikan dukungan teknis kepada tim

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Drs. ABDULLAH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681003 198903 1 007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas tuntunan serta berkat-Nya Penyusunan Rencana Kerja atau yang disingkat Renja Perangkata Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025 dapat terlaksana dengan baik.

Renja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur adalah bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Manggarai Timur Tahun 2025 yang dilaksanakan dengan pendekatan Teknokratik, politis, *bottom up* dan *top down* yang dikaksanakan secara sistematis, transparan dan memastikan semua pemangku kepentigan terlibat secara aktif

. Penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025 dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan semua pihak, oleh karenanya ucapkan terimakasih yang berlimpah kepada semua pihak atas dukungan dan partisipasi aktif

Akhirnya kritik dan saran sangat diharapkan agar menjadi masukan untuk perbaikan pada kesempatan yang akan datang, dengan demikian Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur senantiasa lebih bermanfaat dalam upaya – upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Borong, 5 Juni 2024



DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar isi ii

DaftarTabel iii

Daftar Gambar iv

Formulir E.29 Pengendalian & Evaluasi Terhadap Kebijakan Renja Perang-

kat Daerah

Bab I Pendahuluan

1.1 LatarBelakang 1

1.2 Landasan hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Gambaran Umum Pelayananan Perangkat Daerah 4

1.5 Sistematika Penulisan 7

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 12

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capa

ian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu 12

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 34

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Dae-

rah 43

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 49

2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 83

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 85

3.1 Telaan Terhadap Kebijakan Nasional 85

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 74

3.3 Program dan Kegiatan 74

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaanm Perangkat Daerah 76

Bab V Penutup 107

Lampiran Tabel Rencana Kerja Dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah

Kabupaten manggarai Timur

Daftar Tabel

1. Tabel T- C 29 Hasil Evaluasi Renja dan Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2023 13
2. Tabel Indikator Kinerja Utama Renstra ……..... 32
3. Indikator Kinerja Jumlah PAD (semua sektor) ……... 33
4. Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah …….. 35
5. Tabel Kinerja Realisasi PAD tahun 2018 – 2022…….. 36
6. Rincian Realisasi PAD Tahun 2018 – 2022 ..…….. 38
7. Tabel Realisasi PAD Tahun 2022 dan 2021…… 39
8. Tabel Rincian Rasio Komponen PAD terhadap Total PAD Tahun 2018 – 2022 …….. 40
9. Tabel Rincian Rasio PAD terhadap Total Pendapatan DaerahTahun 2018 – 2022 ……. 41
10. Tabel Permasalah Sektoral Perangkat Daera…….. 43
11. Tabel Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daer…… 45
12. Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025… . 49
13. Tabel Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..…… 83
14. Tabel Telaan Kebijkan Nasional ….…… 87
15. Tabel Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah..…… 90
16. Tabel Telaan terhadap RPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025… 92
17. Lampran Tabel T-C-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perang kat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Manggarai Timur

Daftar Gambar

1. Grafik Kinerja Realisasi PAD tahun 2018 – 2022 …….. 37
2. Grafik total realisasi PAD kurun waktu tahun 2018 – 2019 …….. 37
3. Grafik Rasio Komponen PAD terhadap Total PAD Tahun 2018 – 2022.... 39
4. Grafik Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (%) Tahun 2018 – 2022 …….. 40

RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. Verifikasi dilakukan untukm menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.

Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional **(**Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4752);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata cara perubahan Rencana Pemabangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten manggari Timur Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lemabaran Daerah Kabupaten Manggarai

Timur Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Thun 2019- 2024 (Berita Daerah Kabupaten manggarai Timur Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022 Nomor 50).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Adapun maksud penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) yaitu memberi gambaran mengenai analisis pelayanan perangkat daerah sesuaui tugas pokok, dan fungsi, serta menyajikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rancangan Awal Renja bertujuan untuk menjamin kesesuain antara Program, Kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah, seerta untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Gambaran Umum Pelayananan Perangkat Daerah

a. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daearh

Dasar hukum pembentukan Badan Keuangan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai, sedangkan struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah yakni :

- Tugas Pokok Badan Keuangan Daerah yaitu :
  - perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan;
  - peningkatan pendapatan asli daerah;
  - Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
  - pembinaan teknis penyelenggaraan bidang Keuangan;
  - pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Keuangan; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Fungsi

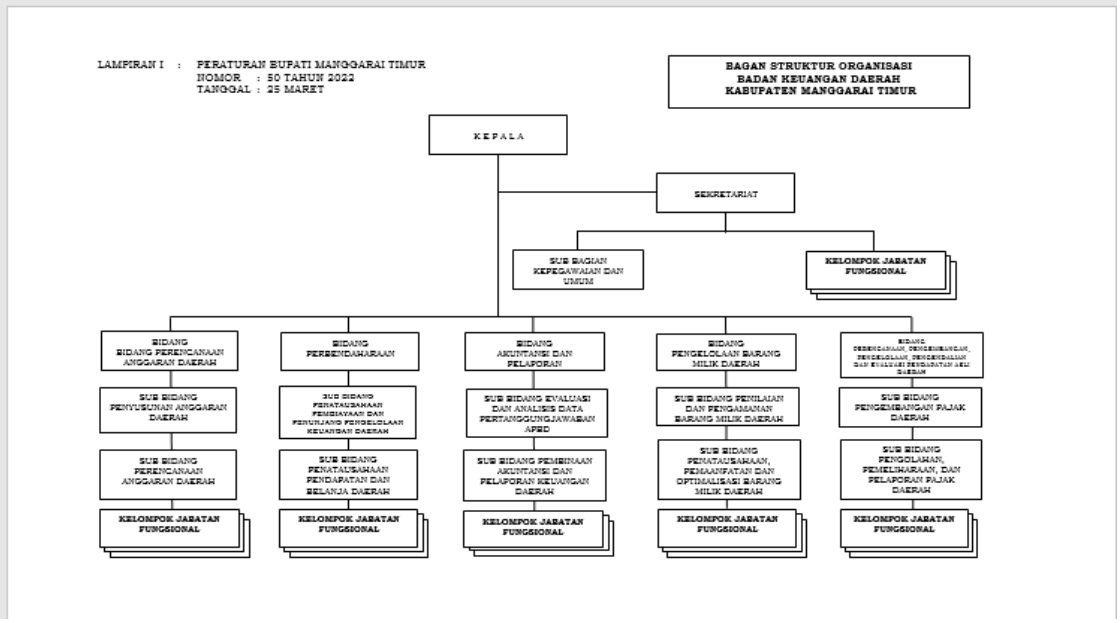
  Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam melaksanakan tugasnya berfungsi sebagai berikut:

  a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Keuangan;
  b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Keuangan;
  c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Keuangan;
  d. Pembinaan teknis penyelenggaraan bidang Keuangan; dan
  e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Dalam menjalankan tugas penunjang urusan pemerintahan bidang keungan, Badan Keuangan Daerah memiliki dua peran yakni sebagai SKPD dan juga sebagai SKPKD yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Keuangan. Badan Keuangan Daerah terdiri dari 6 (enam) bidang termasuk sekretariat.

b. Struktur organisasi

Struktur Organisasi



Badan Keuangan Daerah terdiri atas :

1) Kepala Badan;
2) Sekretariat terdiri atas 1 (satu) Sub Bagian : Sub Bagran Kepegawaian dan Umum.

3) Bidang Perencanaan Anggaran Daerah terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang: Sub Bidang Penyusunan Anggaran Daerah; dan Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran Daerah
4) Bidang Perbendaharaan terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang: Sub Bidang Penatausahaan Pendapatan dan Belanja Daerah; dan Sub Bidang Penatausahaan Pembiayaan dan Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah
5) Bidang Akuntasi dan Pelaporan terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang: Sub Bidang Evaluasi dan Analisis Data Pertanggungiawaban APBD; dan Sub Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
6) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang: Sub Bidang Penatausahaan, Pemanfaatan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah; dan Sub Bidang Penilaian dan Pengamanan Barang Milik Daerah '
7) Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengelolaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang: Sub Bidang Pengembangan Pajak Daerah; dan Sub Bidang Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Pajak Daerah.
8) Kelompok Jabatan Pungsional

   Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

1.5 Sistematika penyusunan Renja

Sistematika penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah tahun 2025 yaitu :

1. Bab I Pendahuluan yang terdiri dari

   Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab beikutnya dapat dipahami dengan baik

   1.1 Latar Belakang

   Mengemukakan pangertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

   1.2 Landasan Hukum

   Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah;

   1.3 Maksud dan Tujuan

   Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

   1.4 Gambaran Umum Pelayananan Perangkat Daerah

   Menguraikan landasan hokum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah

   1.5 Sistematika Penulisan

   Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu yang terdiri dari :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dokumen perencanaan

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah diuraian terkait :

a) Permasalah sektoral perangkat daerah
b) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian pragram nasional/internasional, seperti NSPK SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals) ;
c) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
d) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioitas tahun yang direncanakan

2.4 Review Awal Terhadap Rancangan Awal RKPD

a. Proses yang dililakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

d. Lampirkan tabel beikut, Tabel T-C.31:

2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dan Penelaan Usulan Pokok – Pokok Pikiran DPRD

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daetah kabapaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dan penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antata lain:

a) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program,/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
b) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
c) Sajikan tabel T-C.32 Dengan tabel diambil dai Berita Acara Kesepakatan Usulan Musrenbang dan Berita Acara Kesepakatan Pokir.

3. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu panelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

4. Bab IV Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang manjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian NSPK dan SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, dsb.
b. Uruian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: Jumlah program dan jumlah kegiatan, Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu), Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rencangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya;

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 (Catatan: Tabel diambil dari SIPD Renja)

5. Bab V Penutup.

   Berisikan uraian penutup, berupa:

   a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupan seandainya ketersediaan aggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
   b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
   c. Rencana tindak lanjut, Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

6. Lampiran Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Manggarai Timur

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu

Program dan Kegiatan Tahun 2024 merupakan Program dan Kegiatan penjabaran Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun ke 5 (lima) dari RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 – 2024. Adapun gambaran Capaian program / Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yaitu secara rinci
dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel T-C.29

Hasil Evaluasi Renja dan Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun Lalu

Tahun : 2023

NO	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (Komposit Output) dan SubKegiatan (Output)	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		TingkatRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah			Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP)														
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah			Presentase Pertumbuhan PAD														
A		Meningkatnya PAD		PAD Sektor Keuangan	87,447,000,000	6,963,405,970	33.086.596.972,79	2,804,917,256	84,900,000,000	549,915,100	47,493,237,892.22	480,974,670	55.94	87	47,493,237,892	4,924,500,573	54	71
B		Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	90	1,047,522,805,349	75	271,467,714,040	90	224,290,398,404	77	218,022,464,993	85.69	97	76.06	713,932,934,131	85	68
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
			KEUANGAN			1,081,449,218,612		283,742,053,324		233,188,348,460	-	222,997,716,591.00		95.63		728,106,714,011		67
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	26,128,007,293	98	9,954,597,107	100	8,348,034,956	100	4,494,276,928	100	53.84	99	9,249,279,307	99	35
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, PPAS, RKA, DPA) Perangkat Daerah	100	212,798,412	100	82,890,000	100	32,581,200	100.00	32,581,200	100	100.00	100.00	115,471,200.00	100	54
				Interval Nilai Realisasi Kinerja Renja	100		66.32		100		98.79		99		82.55		83	
				Interval Nilai Realisasi Kinerja Renstra	100		54.81		100		96.57		97		75.69		76	
				Persentase Ketersediaan data dan informasi Sektoral Urusan Perangkat Daerah	100		100		100		100.00		100		100.00		100	
			5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah	4	30,307,748	3	11,996,000	1	7,531,200	1	7,531,200.00	100	100.00	4.00	19,527,200	100	64
				Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	8		6		1		1		100		7		88	
			5.02.01.2.01.02	Jumlah Dokumen RKA-	4				1						4	5500000	100	120

			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	SKPD Perangkat Daerah		4,567,838	3	-		5,500,000	**1**	5,500,000.00	**100**	**100.00**				
			5.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perangkat Daerah	4	4,567,838	3	-	5	5,500,000	**6**	5,500,000.00	**120**	**100.00**	**9**	**5500000**	**225**	**120**
			5.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah	4	3,045,225	3	-	1	3,350,000	1	3,350,000.00	**100**	**100.00**	**4**	**3,350,000**	**100**	**110**
			5.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perangkat Daerah	4	3,045,225	12	-	5	3,350,000	6	3,350,000.00	**120**	**100.00**	**18**	**3350000**	**450**	**110**
			5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LPPD	4	128,454,538	3	55,894,000	1	5,350,000	1	5,350,000.00	**100**	**100.00**	**4**	**61,244,000**	**100**	**48**
				Jumlah Laporan LAKIP	4		3		1		1		**100**		**4**		**100**	
				Jumlah Laporan LKPJ	5		3		1		1		**100**		**4**		**80**	
			5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksnaan dan Evaluasi Hasil RENJA	4	38,810,000	3	15,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000.00	**100**	**100.00**	**4**	**17,000,000.00**	**100**	**44**
				Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Hasil RENSTRA	4		3		1		1		**100**		**4**		**100**	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pencapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**24,545,961,365**	**124**	**3,838,105,022**	**100**	**7,567,435,356**	**100**	**3,731,994,600**	**100**	**49.32**	**65**	**7,570,099,622**	**65**	
			5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	109	23,396,469,220	144	3,548,796,502	38	7,053,950,076	**38**	3,277,501,042	**100**	**46.46**	**38**	**6826297544.00**	**35**	**29**
			5.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16	1,130,492,145	16	274,808,520	20	482,207,680	**20**	423,243,558	**100**	**87.77**	**20**	**698,052,078**	**125**	**62**
			5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	12,500,000	3	14,500,000	1	2,000,000	1	2,000,000	**100**	**100.00**	**4**	**16,500,000**	**100**	**132**
			5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	48	6,500,000	36	-	12	29,277,600	12	29,250,000	**100**	**99.91**	**48**	**29250000.00**	**100**	**450**
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Pencapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100**	**18,575,000**	**100**	**10,000,000**	**100**	**12,200,000**	**100**	**12,100,000**	**100**	**99.18**	**100**	**22,100,000**	**100**	**119**
			5.02.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah SK Pemakai BMD pada internal SKPD	4	5,500,000	**3**	**-**	1	9,200,000	1	9,100,000	**100**	**98.91**	**4**	**9,100,000**	**100**	**165**
			5.02.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Berita Acara Rekonsiliasi BMD, Laporan Mutasi BMD, Laporan Pengadaan BMD, LBPS dan LBPT	4	13,075,000	3	10,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	**100**	**100.00**	**4**	**13,000,000**	**100**	**99**
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase Ketercapaian Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**100**	**7,000,000**	**4**	**-**	**100**	**1,600,000**	**100**	1,550,000	**100**	**96.88**	**100**	**1,550,000**	**100**	**22**
			5 02 01 2.04 01 Perencanaan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi	3	3,500,000	2	-	1	1,000,000	1	950,000	**100**	**95.00**	**3**	**950,000**	**100**	**27**

			Retribusi Daerah	Daerah														
			5.02.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3	3,500,000	2	-	1	600,000	1	600,000	100	100.00	3	600,000	100	17
			1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**100**	**9,000,000**	**4**	**-**	**100**	**6,000,000**	**100**	6,000,000	100	100.00	100	6,000,000	100	67
			5.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	4,500,000	2	-	1	3,000,000	1	3,000,000	100	100.00	3	3,000,000	100	67
			5.02.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	4,500,000	2	-	1	3,000,000	1	3,000,000	100	100.00	3	3,000,000	100	67
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**984,591,353**	**87**	**610,544,568**	**100**	**522,257,400**	**100**	**514,440,559**	**100**	**98.50**	**27**	**1,124,985,127**	**27**	**114**
			5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	97	7,045,000	30	518,000	4	5,000,000	4	5,000,000	100	100.00	34	5,518,000	35	78
			5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21	87,279,750	11	64,256,000	3	40,796,000	3	38,836,000	100	95.20	14	103,092,000	67	118
			5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7061	180,451,550	6,400	146,913,800	18	107,915,000	18	102,273,200	100	94.77	6418	249,187,000	91	138
			5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	439937	109,984,303	114,540	41,398,500	12	18,664,400	12	18,664,400	100	100.00	114552	60,062,900	26	55
			5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64	599,830,750	20	357,458,268	53	349,882,000	53	349,666,959	100	99.94	73	707,125,227	114	118
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**72,069,768**	**438**	**39,403,960**	**100**	**44,495,000**	**100**	**42,687,200**	**100**	**95.94**	**40**	**82,091,160**	**40**	**114**
			5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3480	10,227,259	2,207	4,805,600	1	5,000,000	1	4,932,000	100	98.64	2208	9,737,600	63	95
			5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48	34,799,149	36	24,600,000	12	21,995,000	12	20,255,200	100	92.09	48	44,855,200	100	129
			.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	27,043,360	36	9,998,360	1	17,500,000	1	17,500,000	100	100.00	37	27,498,360	77	102
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**278,011,395**	**100**	**174,058,829**	**100**	**161,466,000**	**100**	**152,923,369**	**100**	**94.71**	**83**	**326,982,198**	**83**	**118**
			5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22	243,497,220	22	141,272,829	26	148,200,000	**26**	140,423,369	100	94.75	24	281,696,198	109	116
			.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19	15,478,500	10	7,970,000	11	5,010,000	**11**	4,300,000	100	85.83	11	12,270,000	55	79
			5.02.01.2.09.09		4				3						3		75	173

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		19,035,675	3	24,816,000		8,256,000	**3**	8,200,000	**100**	**99.32**		**33,016,000**		
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Rasio belanja pegawaai di luar guru dan tenaga kesehatan**	**100**	**1,045,425,001,909**	**19.83**	**268,070,161,656**	**100**	**223,890,398,404**	**16.09**	**217,625,161,478**	**100**	**97.20**	**18**	**712,261,861,958**	**100**	**68**
				Ketepatan Penyampaian LKPD	**Ya**		**Ya**		**Ya**		**Ya**		**100**		**Ya**		**50**	
				Rasio Pemanfaatan Aset Lancar Terhadap Total PAD	**36**		**36.28**		**36**		**22.35**		**62**		**29**		**81**	
				Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	**51**		**52**		**51**		**49.82**		**100**		**51**		**100**	
				Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	0		**(9)**		**0**		**-10.74**		**89**		**(10)**		**85**	
				Rasio Anggaran Sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	0.5		**3.85**		**0.5**		**4.06**		**60**		**3.96**		**13**	
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Persentase Ketercapaian Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**100**	**4,060,741,184**	**108**	**1,424,914,034**	**100**	**1,400,000,000**	**166**	**1,394,600,673**	**166**	**99.61**	**148**	**2,819,514,707**	**148**	**69**
			5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	8	175,717,750	6	101,625,000	2	90,000,000	2	90,000,000	**100**	**100.00**	**8**	**191,625,000**	**100**	**109**
			5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	8	136,582,874	6	129,297,000	2	110,000,000	2	109,990,000	**100**	**99.99**	**8**	**239,287,000**	**100**	**175**
			.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	160	7,500,000	120	-	41	2,500,000	41	2,475,000	**100**	**99.00**	**161**	**2,475,000**	**101**	**33**
			.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA Perubahan -SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	160	7,500,000	160	-	41	2,500,000	153	2,475,000	**373**	**99.00**	**313**	**2,475,000**	**196**	**33**
			.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	160	7,500,000	120	-	41	2,500,000	41	2,500,000	**100**	**100.00**	**161**	**2,500,000**	**101**	**33**
			5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	160	7,500,000	160	-	41	2,500,000	153	2,500,000	**373**	**100.00**	**313**	**2,500,000**	**196**	**33**
			5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	8	949,044,735	6	336,618,594	2	236,635,000	2	235,787,946	**100**	**99.64**	**8**	**572,406,540**	**100**	**60**
			5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	8	2,679,395,825	16	825,153,440	2	865,865,000	9	862,275,227	**450**	**99.59**	**25**	**1,687,428,667**	**313**	**63**
			5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6	22,500,000	2	-	2	2,500,000	2	2,035,000	**100**	**81.40**	**4**	**2,035,000**	**67**	**9**
			5.02.02.2.01.10 Koordinasi	Jumlah Objek Pendapatan yang	12	15,000,000	12	15,000,000	12	2,500,000	12	2,062,500	**100**	**82.5**	**12**	**17,062,500**	**100**	**114**

			Perencanaan Anggaran Pendapatan	Tercatat dalam Dokumen Anggaran									0					
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	12		12		2		2		100		14		117	
			5.02.02.2.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	6	30,000,000	2	9,720,000	2	80,000,000	2	80,000,000	100	100.00	4	89,720,000	67	299
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2				2		2		100		2		100	
			5.02.02.2.01.12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Anggaran Pembiayaan	6	22,500,000	2	7,500,000	2	2,500,000	2	2,500,000	100	100.00	4	10,000,000	67	44
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	6		2		1		1		100		3		50	
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Persentase dokumen kordinasi dan Pengeloaan perbendaharaan daerah**	**100**	**2,388,757,240**	**238**	**1,974,791,273**	**100**	**1,010,560,000**	**100**	**1,008,267,620**	**100**	**99.77**	**109**	**2,983,058,893**	**109**	**125**
			5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	**4**	1,184,158,860	2	999,430,497	1	607,334,000	1	607,263,999	100	99.99	3	1,606,694,496	75	136
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					1		1		100		1		#DIV/0!	
			5.02.02.2.02.02 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	**3**	30,000,000	2	34,998,246	1	14,642,000	1	14,540,000	100	99.30	3	49,538,246	100	165
			5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	**4**	227,635,470	2	150,854,220	1	7,500,000	**1**	7,436,000	100	99.15	3	158,290,220	75	70
			5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	**4**	35,226,125	2	57,685,000	1	14,650,000	**1**	14,580,000	100	99.52	3	72,265,000	75	205
			5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	**4**	192,011,705	2	200,997,847	1	139,390,000	**1**	**138,671,880**	100	99.48	3	339,669,727	75	177
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					1		**1**		100		1		#DIV/0!	
			5.02.02.2.02.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	**3**	15,000,000	2	31,451,673	1	108,946,000	**1**	108,946,000.00	100.00	100.00	3	140,397,673	100	936
			5.02.02.2.02.07	Jumlah Laporan	**4**				1						3		75	150

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		172,826,250	2	175,951,360		82,950,000	**1**	82,700,000	**100**	**99.70**		**258,651,360**		
			5.02.02.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Daerah	**4**	173,641,330	2	118,709,080	1	11,084,000	**1**	10,705,741	**100**	**96.59**	**3**	**129,414,821**	**75**	**75**
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas					1		**1**		**100**		**1**		**#DIV/0!**	
			5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4	294,296,375	13	115,687,850	1	12,064,000	**1**	12,064,000	**100**	**100.00**	**14**	**127,751,850**	**350**	**43**
			5.02.02.2.02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	4	48,961,125	2	84,237,500	1	7,000,000	**1**	6,600,000	**100**	**94.29**	**3**	**90,837,500**	**75**	**186**
			5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Kab/Kota	40	15,000,000	40	4,788,000	1	5,000,000	**1**	4,760,000	**100**	**95.20**	**41**	**9,548,000**	**103**	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota					1		**1**		**100**				**#DIV/0!**	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Persentase Ketercapaian Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**100**	**2,356,627,946**	**51**	**2,033,409,441**	**100**	**527,982,626**	**100**	**524,323,738**	**100**	**99.31**	**104**	**2,557,733,179**	**104**	**109**
			5.02.02.2.03.01 Koordinasi	Jumlah Kegiatan Akuntansi Penerimaan	8	89,790,175	4	140,481,95	2	63,469,000	**2**	63,350,748	**100**	**99.8**	**6**	203,832,70	**75**	**227**

			Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	dan Pengeluaran Kas Daerah Terkoordinasikan				7						1		5		
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2		-		2		**2**		**100**		**2**		**100**	**#DIV/0!**
			5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	45	150,342,875	45	96,756,000	45	19,411,000.00	**45**	19,281,000	**100**	**99.33**	**90**	**116,037,000**	**200**	**77**
			5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	48	121,813,500	90	34,906,000	18	20,262,000	**18**	20,177,000	**100**	**99.58**	**108**	**55,083,000**	**225**	**45**
			5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	8	1,459,679,119	4	863,936,114	2	244,830,776	**2**	243,657,298	**100**	**99.52**	**6**	**1,107,593,412**	**75**	**76**
			5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang Terkoordinasi Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Timur yang Tersusun	43	-	43	222,631,516	38	111,723,850.00	**38**	111,711,804	**100**	99.99	**81**	334,343,320.00	**188**	#DIV/0!
				Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10		6		2		**2**		**100**		**8**		**80**	
			5.02.02.2.03.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3	25,835,126	1	3,056,000	1	900,000	**1**	900,000	**100**	**100.00**	**2**	**3,956,000**	**67**	**15**
			5.02.02.2.03.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3	6,090,450	-	52,626,094	1	500,000	**1**	500,000	**100**	**100.00**	**1**	**53,126,094**	**33**	**872**
			5.02.02.2.03.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3	3,045,225	1	2,056,000	1	856,000	**1**	856,000	**100**	**100.00**	**2**	**2,912,000**	**67**	**96**
			5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah	4	17,613,063	2	96,257,978	2	33,448,000	**2**	31,877,888	**100**	**95.31**	**4**	**128,135,866**	**100**	**728**

			Daerah	Daerah yang Tersusun														
			5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	4	317,613,063	2	431,862,782	1	5,000,000	**1**	5,000,000	**100**	**100.00**	**3**	**436,862,782**	**75**	**138**
			5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	6	91,356,750	2	48,152,000	1	21,282,000	**1**	20,712,000	**100**	**97.32**	**3**	**68,864,000**	**50**	**75**
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	22	-	22		22		**22**		**100**		**44**		**200**	
			5.02.02.2.03.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota	7	70,403,375	3	38,131,000	2	5,800,000	**2**	5,800,000	**100**	**100.00**	**5**	**43,931,000**	**71**	**62**
				Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	2	-	-		2		**2**		**100**		**2**		**100**	
			5.02.02.2.03.13 Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	3	3,045,225	1	2,556,000	1	500,000	**1**	500,000	**100**	**100.00**	**2**	**3,056,000**	**67**	**100**
				Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1	-	-		1		**1**		**100**		**1**		**100**	
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Persentase Realisasi Anggaran**	100	**1,036,564,787,066**	**94**	**489,203,585,732**	**100**	**220,951,855,778**	**100**	**214,697,969,447.00**	**100**	**97.17**	**97**	**703,901,555,179**	**97**	**68**
			5.02.02.2.04.04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah(%)	100	120,084,016,667	100	729,912,250	*100	2,700,000,000	100.00	2,675,666,416	**100**	**99.10**	**100**	**3,405,578,666**	**100**	**3**
				Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerahh	1		0%		1		1		**100**		**1**		**100**	
			5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa yang menerima penyaluran bantuan keuangan	159	998,658,343,335	159	467,535,384,317	159	212,831,913,400	159.00	210,503,868,790	**100**	**98.91**	**159**	**678,039,253,107**	**100**	**68**
				Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1				2		2		**100**		**1**		**100**	
				Jumlah lembaga penerima Hibah (KPUD dan BAWASLU)					0		0		**-**		**0**		**0**	
			5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dana Darurat dan Mendesak	100	18,186,916,453	100	17,093,686,722	100	1,760,789,879	100.00	367,796,702	**100**	**20.89**	100	**17,461,483,424**	**100**	**96**
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1		,0		1		1		**100**		1%		**1**	
			5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang menerima Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	159	19,719,527,278	159	4,574,514,693	159	3,659,152,499	159	1,150,637,539	**100**	**31.45**	**159**	**5,725,152,232**	**100**	**29**
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4				4		4		**100**		**4**		**100**	
			PROGRAM	**Manajemen Aset**									**92**		**84**			**80**

			PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			**2,097,803,440**		**1,273,768,658**		**400,000,000**		**397,303,515**		**99.33**		**1,671,072,173**		
				1. Apakah ada daftar aset tetap (ya/tidak)	**Ya**		**Ya**		**Ya**		**Ya**		**100**		**100**		**75**	
				2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (ya/tidak)	**Ya**		**Ya**		**Ya**		**Ya**		**100**		**100**		**75**	
				3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (ya/tidak)	**Ya**		**Ya**		**Ya**		**Ya**		**100**		**100**		**75**	
				4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran (ya/tidak)	**Ya**		**Ya**		**Ya**		**Ya**		**100**		**100**		**75**	
				Rasio Pemanfaatan Aset Tetap Terhadap Total PAD	**36**		**36.42**		**36**		**22**		**62**		**22**		**62**	
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Persentase Ketercapaian Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100**	**2,097,803,440**	**5,083**	**1,273,768,658**	**100**	**400,000,000**	**128**	**397,303,515**	**128**	**99.33**	**41**	**1,671,072,173**	**41**	**80**
			5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga Yang disusun	4	48,992,000	9	39,222,000	1	25,000,000	2	24,395,000	**200**	**97.58**	**11**	**63,617,000**	**275**	**130**
			5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	6	56,242,000	3	25,044,000	2	15,000,000	2	15,000,000	**100**	**100.00**	**5**	**40,044,000**	**83**	**71**
			5.02.03.2.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	19	48,850,000	14	23,700,000	1	37,500,000	1	36,369,179	**100**	**96.98**	**15**	**60,069,179**	**79**	**123**
			5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan	4	276,000,000	2	211,763,938	1	111,494,000	1	110,964,000	**100**	**99.52**	**3**	**322,727,938**	**75**	**117**
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1				1		1		**100**		**1**		**100**	
			5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	4	48,850,000	2	125,665,000	1	49,530,000	1	49,290,000	**100**	**99.52**	**3**	**174,955,000**	**75**	**358**
			5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terjamin Keamanannya	16,576	160,000,000	6,415	80,030,000	319	32,875,000	319	32,835,000	**100**	**99.88**	**6734**	**112,865,000**	**41**	**71**
				Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1				1		1		**100**		**1**		**100**	
			5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dinila	4	240,000,000	2	102,895,852	2	17,305,000	2	17,305,000	**100**	**100.00**	**4**	**120,200,852**	**100**	**50**
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2				2		2		**100**		**2**		**100**	
			5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah	4	172,000,000	2	73,685,500	2	18,250,000	2	18,250,000	**100**	**100.00**	**4**	**91,935,500**	**100**	**53**
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1				2		2		**100**		**2**		**200**	
			.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dioptimalkan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10	52,250,000	10	70,785,000	1	30,930,000	3	30,930,000	**300**	**100.00**	**13**	**101,715,000**	**130**	**195**
				Jumlah Dokumen hasil	1				1						**3**		**300**	

				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah							3		300					
			5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4	20,000,000	2	24,950,000	1	26,350,000	1	26,350,000	100	100.00	3	51,300,000	75	257
			5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4	83,230,000	2	62,080,000	1	25,320,000	1	25,169,336	100	99.40	3	87,249,336	75	105
			5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah	4	891,389,440	2	433,947,368	1	10,446,000	1	10,446,000	100	100.00	3	444,393,368	75	50
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	46				46		46		100		46		100	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**Rasio PAD**	**9.65**	**7,798,405,970**	**3.17**	**4,443,525,903**	**9.43**	**549,915,100**	**4.11**	**480,974,670**	**43.60**	**87.46**	**4.11**	**4,924,500,573**	**43**	**63**
				Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	**0**		**55**		**0**		**-27.22**		**73**		**-27**		**73**	
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**100**	**7,798,405,970**	**165**	**4,443,525,903**	**100**	**549,915,100**	**110**	**480,974,670**	**110**	**87.46**		**4,924,500,573**	**246**	**63**
			.02.04.2.01.01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	**9**	15,000,000	9	5,000,000	9	8,542,000	9	8,542,000	100	100.00	18	13,542,000	200	90
				Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	**1**				1		1		100		1		100	
			5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12	55,000,000	6	17,139,000	2	4,107,000	2	4,107,000	100	100.00	8	21,246,000	67	39
			5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8	170,000,000	4	48,690,000	4	24,642,400	4	18,042,400	100	73.22	8	66,732,400	100	39
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					4		4		100		4			
			5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang disediakan	1	150,000,000	1	319,010,000			-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	319,010,000	100	213
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang disediakan	2		2				-		#DIV/0!		2		100	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang disediakan	11		8				-		#DIV/0!		8		73	
			5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek	Jumlah Objek Pajak Daerah yang terdaftar	178,340	3,509,415,230	206,609	2,442,639,706	774	63,603,500	774	63,463,500	100	99.78	207,383.00	2,506,103,206	116	71

			Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	110				110		110		**100**		110.00		**100**	
			5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	2,908,994,855	6	1,089,020,340	1	231,001,200	1	171,071,700	100	74.06	7	**1,260,092,040**	**58**	**43**
			5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	206609	319,995,885	199	294,934,100	206,609	70,440,000	206,609	68,904,070	**100**	**97.82**	**206808**	**363,838,170**	**100**	**114**
				Jumlah objek Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	260				100		191		**191**		**191**		**73**	
				Jumlah objek Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PBB	206,609				206,609		206,609		**100**		**206609**		**100**	
			5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah yang ditetapkan	621,672	150,000,000	1,000	48,340,000	750	31,175,700	750	31,145,700	**100**	**99.90**	**1750**	**79,485,700**	**0**	**53**
				Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	9				9		9		**100**		**9**		**100**	
			5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	32	15,000,000	1	3,540,000	9	3,000,000	9	3,000,000	**100**	**100.00**	**10**	**6,540,000**	**31**	**44**
				Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9				9		9		**100**		**9**		**100**	
			5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	70	140,000,000	1,000	47,325,000	9	37,000,000	9	36,950,000	**100**	**99.86**	**1,009**	**84,275,000**	**1441**	**60**
			5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Pajak Daerah yang ditagih	68,937,970,815	140,000,000	38,544,423,981	49,677,757	17,528,374,758	54,785,600	19,021,385,352	54,680,600	**109**	**99.81**	**57,565,809,332.59**	**104,358,357**	**84**	**75**
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	9				9		9		**100**		**9**		**100**	
			5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	150	20,000,000	54	5,000,000	12	417,700	12	417,700	**100**	**100.00**	**66**	**5,417,700**	**44**	**27**
			5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	9	135,000,000	9	49,860,000	9	12,950,000	9	12,400,000	**100**	**95.75**	**9**	**62,260,000**	**100**	**46**
				Jumlah Pajak Daerah yang dikendalian, diPeriksa dan diawasi	9		9		9		9		**100**		**9**		**100**	
0			5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengeloaan Retribusi Daerah	18	70,000,000	6	23,350,000	4	8,250,000	4	8,250,000	**100**	**100.00**	**10**	**31,600,000**	**56**	**45**

				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	18		6		4		4		**100**		**10**		**56**	
Rata-rata capaian kinerja SASARAN (%); (A+B+C+ …. + G)/7 x 100%											**71**		**71**				**69**	
Rata-rata capaian kinerja PROGRAM (%); PROGRAM 1 + PROGRAM 2 + …. PROGRAM n / TOTAL PROGRAM x 100 %											**74**		**74**				**74**	
Rata-rata capaian kinerja KEGIATAN (%); (KEGIATAN 1 + KEGIATAN 2 + …. + KEGIATAN n / TOTAL KEGIATAN x 100%											**107**		**113**				**101**	

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Terdapat 3 program yang dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yaitu : Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Progrman Pengelolaan Pendapatan Daerah

   Dari 3 program tersebut diatas, semuanya tidak mencapai target.

   - Program Pengelolaan Keuangan Daerah

     Capaiann Program Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan akumulasai dari capaian indiaktor kinerja program: Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan 100%, Ketepatan Penyampaian LKPD 100%, Rasio Pemanfaatan Aset Lancar Terhadap Total PAD 62%, Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi

transfer expenditures) 100%, Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD 89%, dan Rasio Anggaran Sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya 60%.

Berdasarkan realisasi masing – masing indicator kinerja tersebut diatas, akumulasi capaian kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerahmenjadi 85%.

- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

  Capaian Program Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan akumulasi Capaian dari indikator : 1). Manajemen Aset yang terdiri dari

  : Tersedianyan daftar aset tetap dengan capaian 100%, tersedianya manual untuk menyusun daftar aset tetap 100%, Terlaksananya proses inventarisasi aset tahunan 100%, dan terdapat nilai aset tercantum dalam laporan anggaran dengan capaian 100%. 2). Rasio Pemanfaatan Aset Tetap Terhadap Total PAD yang mencapai 62%.

  Akumulasi Capaian Kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerahmenjadi 92%.

- Progrman Pengelolaan Pendapatan Daerah

  Capaian Program Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan akumulasicapaian indikator :

  1) Rasio PAD yang mencapai 44%
  2) Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD yang mencapai 73%.

Akumulasi Capaian Program Pengelolaan Pendapatan Daerah menjadi 58%.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Walaupun pada level indicator kinerja program tidak mencapai target, naumun pada level kegiatan target kinerja semua mencapai target.

1. Capaian Kegiatan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah

   Ada 4 (empat) kegiatan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

   1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
   2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
   3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan PelaporanKeuangan Daerah
   4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan KeuanganDaerah

   a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan Capaiankinerja 166%

      Capaian Kinerja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah merupakan akumulasi capaian keluaran 12 (dua belas) sub kegiatan. Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yaitu 166% dari target 100%. Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah melebihi target disebakan oleh tingginya Capaian pada beberapa Sub Kegiatan yaitu :

      - Koordinasi. Penyusunan dan Verifikasi RKA Perubahan – SKPD, target kinerja yaitu Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi dari target 41 realisasi mencapai

153 atau373%

- Koordinasi. Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD, target kinerja yaitu Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi, dari target 41 realisasi mencapai mencapai 153 atau 373%.
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, target yaitu Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD. dari target 2 realisasi mencapai 9 atau 450%

Tingginya realisasi 3 sub kegiatan tersebut diatas disebabkan oleh karena ada beberapa kali pergeseran yang berdampak pada meningkatnya jumlah dokumen RKA, DPA, dan jumlah peraturan bupati penjabaran APBD.

b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan Capaian kinerja 100%

Capaian Kinerja Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah merupakan akumulasi capaian keluaran 11 (sebelas) sub kegiatan. Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yaitu 100% dari target 100%.

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan Capaian kinerja 100%

Capaian Kinerja Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

merupakan akumulasi capaian keluaran 13 (tiga belas) sub kegiatan. Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yaitu 100% dari target 100%.

d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Capaian Kinerja Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu mencapai 100% dari target 100%.

   Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2023 terdiri dari :

   - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
   - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
   - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
   - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Hasil Kabupaten/Kota

Khusus sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan salah satu indicator kinerjanya yaitu Jumlah lembaga penerima Hibah dalam hal ini hibah dana Pemilihan Umum tahun 2024 kepada KPUD dan BAWASLU Kabupaten Manggarai Timur.

Pada APBD induk indikator kinerja Jumlah lembaga penerima Hibah (KPUD dan BAWASLU) yaitu 2 lembaga, namun pada perubahan APBD target ini menjadi 0 (nol) yang disebabkan oleh karena penganggaran pagu alokasi dianggarkan pada

SKPD yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kab. Manggarai Timur.

2. Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerahdengan Capaian 139%

   Kegiatan pada pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai 1 (satu) kegiatan yakni Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

   Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki 12 (dua belas) subkegiatan .

   Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan akumulasi capaian keluaran 12 (dua belas) sub kegiatan. Realisasi Capaian

   kinerja kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu 139% dari target 100%.

   Tingginya realisasi capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerahdisebakan oleh :

   - Tingginya realisasi capaian kinerja pada salah satu Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga. Keluaran yang menjadi target pada sub kegiatan Penyusunan Standar Harga yaitu Jumlah Dokumen Standar Harga Yang disusun. Dari target 1 Dokumen, realisasi 2 dokumen sehingga capaian kinerja mencapai 200%.
     Realisasi melebihi target, hal ini sesuai dengan dinamika kebutuhan terhadap penyesuaian standar Harga. Dokumen

tersebut dalam bentuk Peraturan Bupati Manggarai Timur tentang Standar Satuan Harga

- Tingginya realisasi pada sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan., Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan indikator Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dioptimalkan Penggunaan.Pemanfaatan,Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, dari target 1 realisasi mencapai 3 item yaitu : 1). Pengalihan status pencatatan tanah dan bangunan. 2). Pengalihan status pencatatan perlatan mesin. 3). Pemusnahan obat – obatan pada Dinas Kesehatan Kab. Manggarai Timurl oleh karena kadaluwarsa.

3. Capaian kinerja Kegiatan pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerahdengan Capaian 110%

   Kegiatan pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu terdiri dari 1 (satu) kegiatan yakni Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

   Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki 13 (empat belas) subkegiatan .

   Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan akumulasi capaian keluaran 13 (tiga belas) sub kegiatan. Realisasi Capaian kinerja Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu 110% dari target 100%. Realisasi capaian kinerja Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

melebihi target kinerja disebabkan karena realisasi pada beberapa sub kegiatan: Sub kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Target kinerja Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya dalam hal ini Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari target 100 realisasi mencapai 191 atau 191%

- Sub kegiatan Penagihan Pajak Daerah, indikator kinerja yaitu Jumlah Pajak Daerah yang ditagih, target Rp17.528.374.758 realisasi mencapai 19.021.385.352 atau mencapai 109%

3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Program Renstra merupakan rencana program untuk 5 (lima) tahun yang dalam pelaksanaanya dijabarkan dalam rencana kerja tahunan SKPD (Renja SKPD, hal ini memiliki konsekwensi logis dimana capaian program Renja akan berdampak pada hasil program Renstra. Ada 2 (dua) indicator kinerja Renstra yang merupakan Indicator Kinerja Utama (IKU) yaitu sperti pada tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja Utama Renstra

NO	Kinerja	Target kinerja tahun 2024	Target kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja s/dTahun 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=(6/3)*100%*
1	Indeks Pengelolaan Keuangan. Pendapatan danAset Daerah	90	90	77	77	86
2	Jumlah PAD (semua sektor)	87.447.000.000.00	84.900.000.000.00	47.493.237.892.22	47.493.237.892.22	56

Sumber data :LRA tahun 2023 dan Renstra Badan Keuangan Daerah 2019-2024

1. Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan. Pendapatan dan Aset Daerah

   Target Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada tahun 2023 sama dengan target pada Renstra (tahun 2024) yaitu 90. Realisasi pada tahun 2023 sebesar 75 dan realisasi sampai dengan tahun 2023 yaitu 77 (realisasi tahun 2021, 78 + realisasi tahun 2022, 75 dan realisasi tahun 2023 sebesar 77 lalu dibagi 3) dengan demikian Capaian Kinerja sampai dengan tahun 2023 yaitu 86% (realisasi 77/target 90 x 100%)

2. Indikator Kinerja Jumlah PAD (semua sektor)

No	Tahun	PAD (Rp)		
		Target Renstra	Realisasi	%
1	2020	44.007.000.000.00	47.552.521.548.57	108
2	2021	80.026.000.000.00	44.168.186.981.76	55
3	2022	82.427.000.000.00	33.086.596.972.79	40
4	2023	84.900.000.000.00	47.493.237.892.22	56
5	2024	87.447.000.000.00		

Sumber data :LRA tahun 2021&2022 dan 2023 dan Renstra Badan Keuangan Daerah 2019-2024

Target Indikator Kinerja Utama Jumlah PAD (semua sektor) pada tahun 2023 yaitu Rp84.900.000.000.00 dan realisasi mencapai Rp47.493.237.892.22 atau 56%.

4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

1. Penguatan kapasitas pengelola keuangan daerah mulai dari perencanaaan penganggaran, penatausahaaan dan pelaporan
2. Penguatan kapasitas pengelola Barang Milik Daerah dalam mengelola Barang Milik Daerah
3. Penyediaan penilai Barang Milik Daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan
4. Peningkatan pengaman Barang Milik Daerah

5. Meningkatkan koordinasi dengan semua sector terkait
6. Peningkatan pemanfaatan tekhnologi informasih dalam pengelolaaan keuangan, barang milik daerah dan pendapatan daerah
7. Menyediakan regulasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku
8. Peningkatan pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam membayar pajak daerah melalui sosialisai pajak daerah
9. Pembenahan basis data pajak
10. Peningkatan sosialisasi pajak
11. penguatan sumber daya pengelola pajak. S
12. Penerapan manajemen risiko dan reformasih birokrasi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Target dan Realisasi Kinerja Pelayananan Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur yang mengacu pada Renstara tahun 2019 – 2024.

Dalam pelaksanaanya, Renstra mengalami perubahan, sehingga indikator kinerja sasaran mengalami perubahan, yakni pada tahun 2019 -2020 (periode awal) sedangkan perubahannya pada tahun 2021 – 2024.

Indikator awal sebagaimana pada nomor urut 1,2 dan 3 pada tabel TC. 23 diatas, sedangkan nomor 4 dan 5 merupakan indikator perubahan.

Selain indiaktor kinerja tersebut diatas, perubahan juga dilakukan untuk menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri. Perubahan Indikator kinerja sasaran Renstra secara subtantif tidak mengalami perubahan, yakni terkait dengan kemampuan keuangan daerah yang diukur dengan indikator ***realisasi PAD*** dan yang terkait dengan tata kelola keuangan daerah diukur dengan indicator ***Indeks Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah***

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	1	2	3	4	5
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
1	*Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah*				*100*	*100*				*99*	*99.00*				*98.9*	*99.0*			
2	*Persentase Aset yang dilaporkan diNeraca (%)*				*100*	*100*				*100*	*100*				*100.0*	*100.0*			
3	*Persentase Penigkatan Realisasi PAD (%)*				*24.38*	15.60%				*23.70*	-12.66%				*97.2*	*-81.2*			
4	PAD Sektor keuangan						80,026,000,000	82,427,000,000	84,900,000,000	54,434,713,623.57	47,543,467,048.56	44,060,419,118.19	33,086,596,972.79	47,337,232,585.23			55	40	56
5	Indeks Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah						90	90	90			78	75	76			87	83	84

- **Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah**

  Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan akumulasi capaain dari 3 (tiga) program yakni : Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengeloaan Barang Milik Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

  Rumus Indikator:

  IPkeuangan daerah =

  $3\sqrt{AxBxC}$

  A = Persentase capaian program pengelolaan keuangan daerah

  B = Persentase capaian program pengelolaa barang milik

- **Indikator Jumlah PAD Sektor Keuanga**

  Perhitungan capaian indikator kinerja Jumlah PAD Sektor Keuangan yaitu Total realisasi PAD Kabupaten Manggarai Timur dalam 1 (satu) tahun anggaran dibagi dengan target realisasi pada RPJMD yang dijabarkan lebih lanjut pada Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

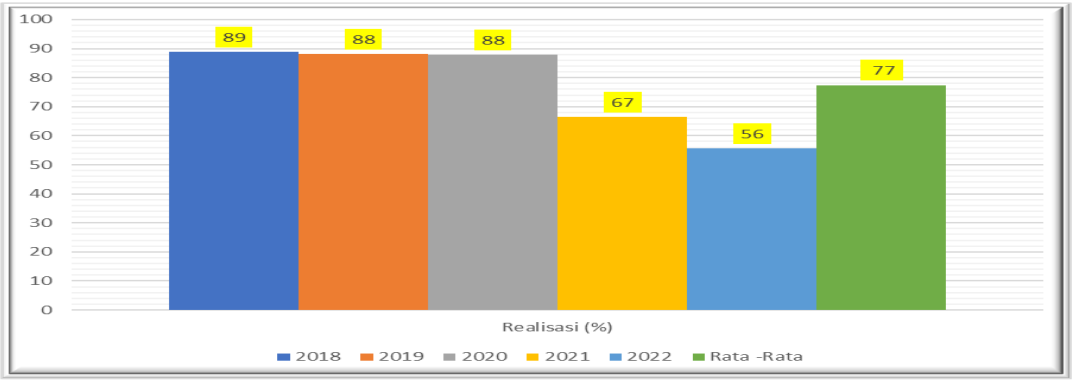
Dari dua indicator kinerja tersebut diatas **Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah** dari kurun waktu tahun 2019 – 2023 relatif cukup baik, sedangkan **Indikator Jumlah PAD Sektor Keuangan sangat jauh dari target.**

Berikut akan disajikan kondisi PAD dari tahun 2018 – 2022 :

1. Kinerja Realisasi PAD tahun 2018 – 2022

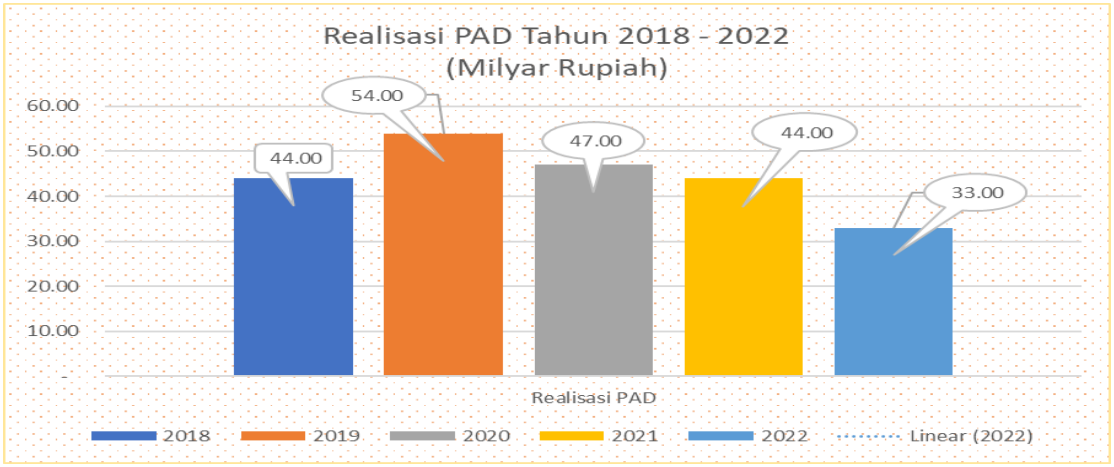
NO	Uraian		Realisasi Tahun					Rata - rata
		Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Target	Rp	49,507,713,692.00	61,755,394,345.00	54,088,575,306.00	66,415,544,870.00	59,555,806,189.00	58,264,606,880.40
2	Realisasi	Rp	44,007,083,306.37	54,434,713,623.57	47,543,467,048.56	44,168,186,981.76	33,086,596,972.79	44,648,009,586.61
3	Persentase Realisasi	%	89	88	88	67	56	77

2. Grafik Kinerja Realisasi PAD tahun 2018 – 2022



Kinerja realisasi PAD tahun 2018 – 2022 yang diukur dari persentase realiasi dari target mengalami penurunan yakni Tahun 2018 mencapai 89%, tahun 2019 mencapai 88%, tahun 2020 mencapai 88%, tahun 2021 mencapai 67%, dan tahun 2022 mencapai 56%. Rata – rata realisasi mencapai 77%.

3. Grafik total realisasi PAD kurun waktu tahun 2018 – 2019



Rincian Realisasi PAD Tahun 2018 - 2022

No.	Uraian	Realisasi PAD per tahun (RP)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pajak Daerah	12,307,067,313.27	17,141,956,797.18	12,490,746,249.00	12,312,478,127.80	13,741,199,604.00
2	Retribusi Daerah	1,615,985,576.00	2,544,533,221.00	2,868,218,118.00	2,647,973,407.00	3,614,472,973.50
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,762,717,194.00	9,927,249,503.00	10,437,225,306.01	10,261,866,180.00	6,335,890,845.00
4	Lain - lain PAD yang sah	21,321,313,223.10	24,820,974,102.39	21,756,331,875.56	18,945,869,266.96	9,395,033,550.29
5	Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)	44,007,083,306.37	54,434,713,623.57	47,552,521,548.57	44,168,186,981.76	33,086,596,972.79

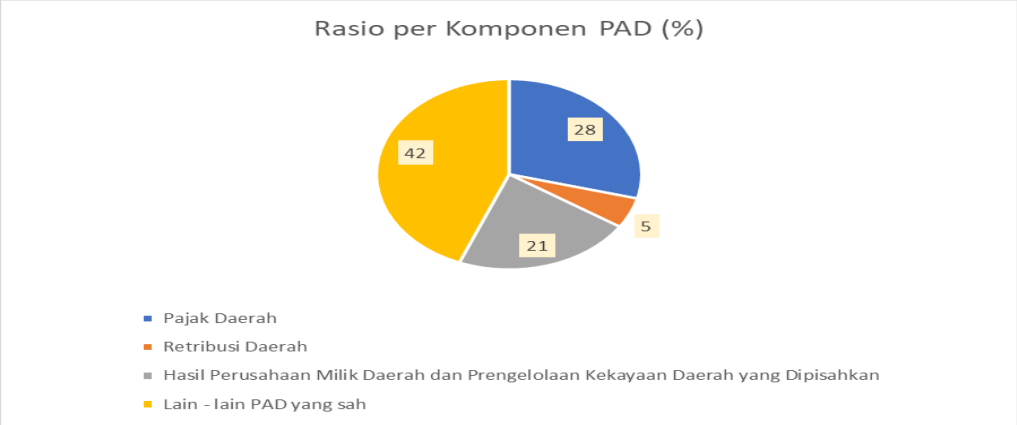
Realisasi PAD kurun waktu 2018 – 2022 mengalami fluktuatif, tahun 2018 – 2019 mengalami peningkatan , sedangkan pada tahun pada tahun 2020 – 2022 cendung menurun. Pada tahun 2020 – 2021 mengalami penurunan lebih disebabkan oleh karena adanya pandemic Covid 19, sedangkan pada tahun 2022 selain oleh karena tidak tercapainya realisasi pada beberapa komponen PAD, juga disebabkan adanya perubahan regulasi terkait pencatatan dan pelaporan pendapatan daerah. Hal ini terkait dengan ***perubahan pencatatan Pendapatan Dana Kapitasi JKN*** pada FKTP dimana pada tahun 2021 dicatat pada akun Pendapatan Daerah pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Jenis Lain – Lain PAD Yang Sah, sedangkan pada tahun 2022 tercatat pada akun Pendapatan Daearah pada kelompok/jenis Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Realisasi Dana Kapitasi JKN pada tahun 2021 sebesar Rp.8.830.424.000,00 dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 9.753.180.543,00.

Tabel Realisasi PAD Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun		Bertambah/(Berkurang)	%
		2022	2021		
1	Pajak Daerah	13,791,832,468.00	12,312,478,127.80	1,479,354,340.20	12.02
2	Retribusi Daerah	3,648,246,201.06	2,647,973,407.00	1,000,272,794.06	37.78
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,335,890,845.00	10,261,866,180.00	(3,925,975,335.00)	(38.26)
4	Lain-lain PAD yang Sah	9,238,817,754.00	18,945,869,266.96	(9,707,051,512.96)	(51.24)
5	Jumlah	33,014,787,267.56	44,168,186,981.76	(11,153,399,714.20)	(25.25)

4. Grafik Rasio Komponen PAD terhadap Total PAD Tahun 2018 - 2022



Tabel Rincian Rasio Komponen PAD terhadap Total PAD

Tahun 2018 - 2022

No.	Uraian / Komponen PAD	Rasio Komponen PAD terhadap total PAD					
		2018	2019	2020	2021	2022	Rata – rata (%)
2	Pajak Daerah	27.97	31.49	26.27	27.88	41.53	28
3	Retribusi Daerah	3.67	4.67	6.03	6.00	10.92	5
4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.91	18.24	21.95	23.23	19.15	21
5	Lain - lain PAD yang sah	48.45	45.60	45.75	42.89	28.40	46

Tabel menunjukan bahwa rasio komponen PAD terhadap total PAD dari tahun 2018 – 2022 didominasi dari Jenis Lain - lain PAD yang sah dengan rata – rata sebesar 46%, Pajak Daerah rata – rata 28%, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan rata – rata 21% dan Retribusi Daerah 5%. Dengan demikian Rasio yang terendah dari jenis Retribusi daerah.

5. Grafik Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (%) Tahun 2018 – 2022



Tabel Rincian Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah

Tahun 2018 - 2022

No.	Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio PAD Terhadap total Pendapatan daerah
1	2018	44,007,083,306.37	1,026,421,494,021.37	4.3
2	2019	54,434,713,623.57	1,114,414,468,087.57	4.9
3	2020	47,552,521,548.57	1,038,515,650,766.78	4.6
4	2021	44,168,186,981.76	1,104,328,463,915.76	4.0
5	2022	33,086,596,972.79	1,059,724,001,990.79	3.1
6	Rata -rata (%)			4,2

Rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah menggambarkan kemampuan keuangan daerah . Dari tabel menunjukan bahwa dari tahun 2018 – 2022 rata – rata Rasio PAD terhadapa total Pendapatan daerah yakni 4,2%

Kesimpulan terkait realisasi indikator kinerja Jumlah PAD (semua sektor):

1. Dari aspek kinerja (realisasi dari target)

   Kinerja realisasi PAD tahun 2018 – 2022 yang diukur dari persentase realiasi dari target mengalami penurunan yakni Tahun 2018 mencapai 89%, tahun 2019 mencapai 88%, tahun 2020 mencapai 88%, tahun 2021 mencapai 67%, dan tahun 2022 mencapai 56%. Rata – rata realisasi mencapai 77%.
2. Dari aspek kecendrungan realisasi

   Realisasi PAD kurun waktu 2018 – 2022 mengalami fluktuatfi, tahun 2018 – 2019 mengalami peningkatan , sedangkan pada tahun pada tahun 2020 – 2022 cendung menurun. Pada tahun 2020 – 2021 mengalami penurunan lebih disebabkan oleh karena adanya pandemic Covid 19, sedangkan pada tahun 2022 selain oleh karena tidak tercapainya realisasi pada beberapa

komponen PAD, juga disebabkan adanya perubahan regulasi terkait pencatatan dan pelaporan pendapatan daerah. Hal ini terkait dengan perubahan pencatatan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP dimana pada tahun 2021 dicatat pada akun Pendapatan Daerah pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Jenis Lain – Lain PAD Yang Sah, sedangkan pada tahun 2022 tercatat pada akun Pendapatan Daearah pada kelompok/jenis Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Realisasi Dana Kapitasi JKN pada tahun 2021 sebesar Rp.8.830.424.000,00 dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 9.753.180.543,00

3. Dari aspek rasio komponen PAD terhadap total PAD

   Rasio komponen PAD terhadap total PAD yaitu tertinggi komponen Jenis Lain - lain PAD yang sah dengan rata – rata sebesar 46%, Pajak Daerah rata – rata 28%, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan rata – rata 21% dan yang paling rendaha Retribusi Daerah sebesar 5%.

4. Dari aspek Rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah

   Rata – rata Rasio PAD terhadapa total Pendapatan daerah dari tahun 2018 – 2022 yakni 4,2%. Capaian ini menunjukan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Manggarai Timur saat ini masih tergolong rendah.

Tidak atau belum tercapainya realisasi PAD disebabkan oleh banyak factor baik internal kelembagaan maupun factor – factor eksternal:

1. Hasil evaluasi kelembagaan, dari dimensi struktur menunjukan desain organisasi yang ada bersifat terlalu kompleks pada program/bidang pengelolaan pendapatan daerah
2. Ketersediaan SDM yang masih kurang terutama Pemeriksa Pajak
3. Sistem tatakelola belum semuanya berbasis IT
4. Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi – potensi penerimaan daerah belum dilakukan secara optimal
5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak/retribusi bagi penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan

6. Kurangnya sosialisasi pajak dan retribusi daerah Belum optimalnya penegakan hukum dalam mendukung realisasi pajak/retribusi

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Permasalah sektoral perangkat daerah

Tabel Permasalah Sektoral Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Akuntabilitas Keuangan baik, namun masih ada catatan pengelolaan Aset serta tatakelola pendapatan belum memadai Opini BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur : 2018 = Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2019 = Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2020 = Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2022 = Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya tertib	- Pengamanan Aset tanah Belum Tertib . Aset Tetap Tanah yang tercatat pada KIB A sebanyak 1.784 bidang tanah yang terdiri atas 332 bidang tanah telah bersertifikat dan 1.452 bidang tanah belum bersertifikat - Pelaksanaan Penilaian aset tidak optimal yang disebabkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Manggarai Timur belum memiliki Penilai BMD - Masih terdapat dokumen kepemilikan berupa surat penyerahan tanah dan BPKB Kendaraan yang masih disimpan di Perangkat Daerah dan

			belum diserahkan ke Pembantu Pengelola Barang (Bidang Pengelolaan BMD) - Masih terbatasnya ketersedian sarana pendukung pengamanan Dokumen / fisik BMD
		Realisasi PAD tidak sesuai target dan realisasi dari target cendrung menurun Persentase Realisasi Dari Target Tahun : - 2018 : 89% - 2019 : 88% - 2020 : 88% - 2021 :67% - 2022 : 56% - Rata – rata 2018 -2022 : 77%	- Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi – potensi penerimaan daerah belum dilakukan secara optimal - Penyampaian data Objek Pajak oleh Wajib Pajak tidak semua akurat - Adanya mutasi Objek pajak yang tidak dilaporkan ke Badan Keuangan Daerah - Tingkat kepatuhan wajib Pajak masih rendah - Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan - Tidak tersedianya SDM Pemeriksa pajak - Sistem

			pengelolaan PAD belum sepenuhnya berbasis teknologi informasih serta aplikasi – aplikasi yang ada belum terintergrasi - Hasil evaluasi kelembagaan, dari dimensi struktur menunjukan desain organisasi yang ada bersifat terlalu kompleks yang berdampak pada tidak efektifnya pelaksanaan program dan kegiatan

Dari tabel diatas teridentifikasi 2 (dua) masalah utama dalam pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur yaitu ***Penatausahaan aset daerah*** dan ***tatakelola PAD yang belum optimal.***

b. Tantangan dan peluang

Tabel Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Tantangan	Peluang
1	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang dinamis, inovatif dan berireintasi pelayanan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Efektivitas Pemerintaha	Ketersediaan SDM yang belum memadai terutama Penilai Barang Milik Daerah dan Pemeriksa Pajak	- Tersedianya anggaran untuk Diklat dan Adanya rekrutmen ASN

		n	Daerah	
			Hasil evaluasi kelembagaan, dari dimensi struktur menunjukan desain organisasi yang ada bersifat terlalu kompleks pada program/bidang pengelolaan pendapatan daerah	- Meningkatkan ketersediaan SDM untuk pengelolaan program pendapatan daerah
			Realisasi PAD belum sesuai target	- Pemanfaatan asset daerah yang dapat menghasilkan PAD - Meningkatkan ketersediaan SDM untuk pengelolaan program pendapatan daerah
			Masih terdapat Objek PBB yang belum terdaftar dan Penetapan PBB yang tidak sesuai	- Pendataan ulang objek

			Kepatuhan dan Pengetahuan masyarakat tentang kewajiban perpajakan tergolong rendah	- Sosialisasi pajak -
			Penggunaan aplikasi pengelolaan pendapatan dan pengelolaan barang milik daerah yang bersifat parsial	- Integrasi aplikasi agar lebih efekt Tersedianya aplikasi

c. Formulasi isi – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut 1) Memiliki pengaruh

yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; 3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik; 4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah; 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Adapun isu strategis dalam penyelenggaran tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah pada Renja tahun 2025 yaitu :

1. Ketersediaan sumber daya manusia yang belum memadai
2. Masih terdapat catatan aparat pengawas eksternal terhadap pengelolaan keuangan daerah
3. Realisasi PAD yang tidak mencapai target
4. Pemanfaatan aset dalam mendukung target realisasi PAD masih tergolong rendah
5. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah
6. Pengamanan asset yang belum memadai
7. Data base PBB yang belum memadai
8. Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan melalui pemanfaatan teknologi informasih dalam pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan yang terintegrasi

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025

Hasil reviu rancangan awal RKPD teridentifikasi adanya peningkatan total pagu yang bersumber dari beberapa sub kegiatan dan yang terbesar dari sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, sedangkan pada beberapa sub kegiatan iuga terdapat pengurangan sesuai dengan ketersediaan pagu. Untuk target kinerja dan lokasi kegiatan tidak mengalami perubahan, secra rincia terdapat pada tabel dibawa ini:

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RANCANGAN AWAL			HASIL ANALISIS			KETERANGAN
		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
		Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
3	4	8	9	10	8	9	10	11
BADAN KEUANGAN DAERAH		**234,347,284,695.00**	234,347,284,695.00			275,802,717,796.00		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		-	234,347,284,695.00			275,802,717,796.00		
KEUANGAN			234,347,284,695.00			275,802,717,796.00		

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	-		14,000,000,000.00			47,169,681,924.00		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, PPAS, RKA, DPA) Perangkat Daerah, Interval Nilai Realisasi Kinerja Renja,Interval Nilai Realisasi Kinerja Renstra	100,100,100 Persen	25,500,000.00		100,100,100 Persen	29,844,000.00		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	3 Dokumen	8,500,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung	1 Dokumen	5,482,500.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	

	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Liwut				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Dokumen	5,355,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Dokumen	627,500.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	1,500,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Dokumen	860,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	

	Perubahan DPA-SKPD							
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	5,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	3 Laporan	5,019,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	4 Laporan	4,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian realisasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	13,236,003,000.00		100 Persen	46,440,987,224.00		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	12,832,022,400.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	39 Orang/bulan	46,016,047,804.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	382,980,600.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Dokumen	406,556,520.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9 Dokumen	13,500,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	9 Dokumen	13,637,900.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Laporan	4,392,500.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2,500,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	12 Laporan	352,500.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	8,700,000.00		-	16,300,000.00		
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD								
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	7,700,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Laporan	15,300,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	1 Laporan	1,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong,	1 Laporan	1,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong,	

	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Gurung Liwut			Gurung Liwut	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	1,000,000.00		100 Persen	670,000.00		
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah								
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	500,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Dokumen	335,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah								
	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	500,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Dokumen	335,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	158,000,000.00		100 Persen	83,036,500.00		
Pendataan dan Pengolahan								

Administrasi Kepegawaian								
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Dokumen	4,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	3,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Dokumen	4,036,500.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	150,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	2 Orang	75,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	324,400,000.00		100 Persen	390,551,700.00		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	2 Paket	36,400,000.00	Kab. Manggarai Timur,	2 Paket	8,600,000.00	Kab. Manggarai Timur,	

	Kantor yang Disediakan			Borong, Gurung Liwut			Borong, Gurung Liwut	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	35,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	12 Paket	28,274,500.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	4 Paket	199,645,200.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29 Laporan	250,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29 Laporan	154,032,000.00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	78,874,000.00		100 Persen	88,552,500.00		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat								

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Laporan	4,614,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	20,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Laporan	19,924,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	53,874,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Laporan	64,014,500.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	167,523,000.00		100 Persen	119,740,000.00		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	160,620,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	27 Unit	112,530,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	3,420,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	11 Unit	610,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3,483,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	3 Unit	6,600,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Tingkat kesesuaian laporan keuangan daerah dengan standar akuntansi pemerintahan Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan Rasio Pemanfaatan Aset Lancar Terhadap Total PAD Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	0 Persen 100 Persen < 30 Persen 30 < 58 Persen	219,437,284,695.00		0 Persen 100 Persen < 30 Persen 30 < 58 Persen	228,103,035,522.00		
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase capaian pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	100 Persen	1,700,572,100.00		100 Persen	841,200,000.00		

	Daerah							
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS								
	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	86,935,100.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	18,884,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS								
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	95,238,850.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	2 Dokumen	21,102,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD								
	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	41 Dokumen	2,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	41 Dokumen	2,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD								
	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	41 Dokumen	2,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	41 Dokumen	2,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD								

	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	41 Dokumen	2,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	41 Dokumen	2,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD								
	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	41 Dokumen	2,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	41 Dokumen	2,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD								
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	243,896,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	73,175,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD								
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	1,245,702,150.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	2 Dokumen	707,094,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran								

	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	2,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	2 Dokumen	2,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan								
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	2,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	2 Dokumen	2,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah								
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	2 Dokumen	2,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan								
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	2,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	2 Dokumen	2,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah	41 Orang	12,800,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	41 Orang	4,945,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	

	Kabupaten/Kota							
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase capaian pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 Persen	858,040,000.00		100 Persen	768,000,000.00		
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah								
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	610,094,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Dokumen	538,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya								
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	22,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Laporan	22,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD								
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	7,500,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Dokumen	7,526,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Penatausahaan Pembiayaan Daerah								

	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	6,650,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Dokumen	6,650,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya								
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	93,276,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Dokumen	86,086,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank								
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga	1 Dokumen	22,998,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Dokumen	22,098,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	

	Keuangan Bukan Bank							
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)								
	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan	1 Laporan	64,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Laporan	54,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	

	Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)							
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas								
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi	1 Dokumen	11,084,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Dokumen	11,084,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	

	Kas							
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait								
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	4,564,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Dokumen	4,570,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan								
	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaa	1 Dokumen	5,494,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Dokumen	5,606,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	

	n dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan							
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota								
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	105 Orang	10,380,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	105 Orang	10,380,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase capaian pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 Persen	560,000,000.00		100 Persen	240,000,000.00		
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah								
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2 Laporan	110,460,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	2 Laporan	30,270,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban								

	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	45 Dokumen	15,176,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	45 Dokumen	1,500,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran								
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	8,460,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	18 Laporan	17,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah								
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	217,500,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	2 Laporan	120,500,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota								

	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100,864,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	2 Dokumen	41,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD								
	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	500,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Dokumen	1,500,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah								

	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	500,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Dokumen	500,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD								
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	500,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Dokumen	1,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah								
	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	1,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	2 Dokumen	1,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah								
	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan	1 Dokumen	500,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong,	1 Dokumen	1,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong,	

	Keuangan Pemerintah Daerah			Gurung Liwut			Gurung Liwut	
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota								
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Orang	103,040,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	40 Orang	22,230,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota								
	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	2 Lembaga	1,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	2 Lembaga	1,500,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah								
	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	500,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Laporan	1,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase capaian pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 Persen	216,318,672,595.00		100 Persen	226,253,835,522.00		
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan								
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan	211,100,036,900.00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	221,350,046,422.00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak								
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	2,353,370,300.00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2,000,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota								
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4 Laporan	2,865,265,395.00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	2,903,789,100.00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Manajemen Aset Rasio Pemanfaatan Aset Tetap Terhadap Total PAD	100 Persen 30 Persen	260,000,000.00		100 Persen 30 Persen	240,000,000.00		
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase capaian pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	260,000,000.00		100 Persen	240,000,000.00		
Penyusunan Standar Harga								
	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	19,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Dokumen	14,500,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah								
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	9,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	2 Dokumen	9,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah								
	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	17,604,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	

Penatausahaan Barang Milik Daerah								
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	48,400,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Laporan	48,400,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Inventarisasi Barang Milik Daerah								
	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	25,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Laporan	25,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Pengamanan Barang Milik Daerah								
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	22,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Laporan	15,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Penilaian Barang Milik Daerah								
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	15,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	2 Laporan	15,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah								
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan	2 Laporan	12,830,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong,	2 Laporan	12,830,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong,	

	Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			Gurung Liwut			Gurung Liwut	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah								
	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	18,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Dokumen	18,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah								
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	20,500,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Laporan	20,500,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah								
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	39,866,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Laporan	39,866,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								

	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	46 Orang	12,800,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	46 Orang	11,904,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD dalam APBD	100 Persen	650,000,000.00		100 Persen	290,000,350.00		
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	650,000,000.00		100 Persen	290,000,350.00		
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah								
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	5,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Dokumen	5,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah								

	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	3,500,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Dokumen	3,499,800.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah								
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	7 Laporan	58,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Laporan	14,626,000.00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah								
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Unit	20,500,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	4 Unit	16,457,250.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah								
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	40,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	43,465,500.00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah								

	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	295,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	4 Laporan	70,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)								
	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	187000 Obyek Pajak	20,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	187000 Obyek Pajak	20,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
Penetapan Wajib Pajak Daerah								
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen	27,500,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	4 Dokumen	12,805,900.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah								
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 Layanan	10,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	9 Layanan	5,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah								

	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	9 Dokumen	20,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	9 Dokumen	15,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Penagihan Pajak Daerah								
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	9 Dokumen	62,055,555.00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	25,621,800.00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah								
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	500,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	12 Dokumen	499,900.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah								
	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan	9 Dokumen	20,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	20,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

	Pajak Daerah							
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah								
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	7,000,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	4 Laporan	6,930,000.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah								
	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	60,944,445.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	1 Laporan	31,094,200.00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	
Total (Rp)			**234,347,284,695.00**			**75,802,717,796.00**		

1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahunan yang sedang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Usulan program dan kegiatan ini berasal dari usulan masyrakat melalui Musrenbang yang dilaksanakan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, sampai dengan tingkat Kabupaten Manggarai Timur atau berdasarkan proposal program/kegiatan yang masuk ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Usulan program/kegiatan tersebut diinventarisasi dan dinilai kesesuaiannya berdasarkan nomenklatur baku yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan informasi usulan program/kegiatan yaitu jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi dan besaran volume kegiatan. Hasil inventarisasi usulan program/kegiatan dari masyarakat yang memiliki kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai timur selanjutnya akan dipilah lagi berdasarkan prioritas, fokus kebijakan tahun 2025, Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ingin dicapai, dan implikasi terhadap capaian renstra PD maupun terhadap RPD Kabupaten Manggarai Timur. Secara lengkap usulan program dan kegiatan dari masyarakat untuk tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN
1	665358	01-03-2023	Ubaldus Tamur	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan Obyek Pajak PBB baru di Desa sebanyak 100 obyek	Desa Compang Teo, Kab. Manggarai Timur	Elar	Compang Teo
2	673390	02-03-2023	Rosalia Din	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Masih adanya SPPT PBB yang bermasalah karena objek pajak yang tidak sesuai dengan nama pemilik, tanah yang sudah dijual, wajib pajak yang sudah meninggal,	Wejang Raci RT 001/ RW 001- GoloLaci RT 021/ RW 005, Kab. Manggarai Timur	Poco Ranaka	Mandosawu

					adanya pemecahan tanah dari ahli waris wajib pajak			
3	674816	02-03-2023	Blasius Kasbun	Sosialisasi Pajak Daerah	Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pajak daerah	Desa Compang Mekar, Kab. Manggarai Timur	Lamba Leda	Compang Mekar
4	675260	02-03-2023	Abdul Fata	Sosialisasi Pajak Daerah	Kurangnya Kesadaran Masyarakat	Tengku Leda, Kab. Manggarai Timur	Lamba Leda	Tengku Leda
5	681885	03-03-2023	Fransiskus Sanjay	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan Pajak Daera/PBB	Desa Rana Kulan, Kab. Manggarai Timur	Elar	Rana Kulan
6	683919	03-03-2023	Rosalia Din	Sosialisasi Pajak Daerah	Perlu adanya sosialisasi mengenai Pajak Daerah bagi para wajib pajak di Kelurahan Mandosawu	Wejang Raci RT 001/RW 001- Golo Laci RT 021/ RW 005, Kab. Manggarai Timur	Poco Ranaka	Mandosawu
7	693196	04-03-2023	MELIKIOR WENE	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan Obyek pajak baru di Desa Rana Gapang	Desa Rana Gapang, Kab. Manggarai Timur	Elar	Rana Gapang
8	708632	07-03-2023	Aloysius Gonzaga Roma	Sosialisasi Pajak Daerah	Kurang pahamnya masyarakat desa atas kewajiban (Pajak) yang harus diberikan kepada (Negara)	Desa Benteng Raja, Kab. Manggarai Timur	Borong	Benteng Raja
9	714654	08-03-2023	Saverinus Songku, A.md	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan dan pendaftaran Obyek Pajak di kelurahan Kota Ndora	Kelurahan Kota Ndora, Kab. Manggarai Timur	Borong	Kota Ndora

BAB III
TUJUAN DAN SAARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap kebijakan Nasioanal (https://www.kemenkeu.go.id/media/15894/rencana-strategis kementerian-keuangan-2020-2024.pdf)

1. VISI KEMENTERIAN KEUANGAN

   Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: ”Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

2. MISI KEMENTERIAN KEUANGAN

   Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

   1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
   2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
   3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
   4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
   2. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

2. TUJUAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Sebagai pengelola APBN, setiap kebijakan fiskal yang diambil Kementerian Keuangan melalui alokasi pendapatan dan belanja pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan fiskal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

4. SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Kementerian Keuangan, telah menetapkan sepuluh sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2020-2024 yaitu:

(1) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.

(2) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal.

(3) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi

belanja pusat dan Transfer ke Daera dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.

(4) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah: Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel; Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.

(5) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:

a. Organisasi dan SDM yang optimal;

b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;

c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan

d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Tabel Telaan Kebijkan Nasional

No.	Tujuan	Sasaran	Tantangan	Peluang
1	- Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. - Penerimaan negara yang optimal - Pengelolaan belanja negara yang	- kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif - penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal - belanja pusat	Ketersediaan SDM yang belum memadai terutama Penilai Barang Milik Daerah dan Pemeriksa Pajak Daerah	- Tersediany a anggaran untuk Diklat dan Adanya rekrutmen ASN
			Hasil evaluasi	- Meningkatk an

	berkualitas - Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali - Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.	dan Transfer ke Daera dan Dana Desa (TKDD) yang tepat - Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel; Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali	kelembagaan, dari dimensi struktur menunjukan desain organisasi yang ada bersifat terlalu kompleks pada program/bidang pengelolaan pendapatan daerah	ketersediaan SDM untuk pengelolaan program pendapatan daerah
			Realisasi PAD belum sesuai target	- Pemanfaatan asset daerah yang dapat menghasilkan PAD - Meningkatkan ketersediaan SDM untuk pengelolaan program pendapatan daerah

		Organisasi dan SDM yang optimal; Sistem informasi yang andal dan terintegrasi; Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.	Masih terdapat Objek PBB yang belum terdaftar dan Penetapan PBB yang tidak sesuai	- Pendataan ulang objek
			Kepatuhan dan Pengetahuan masyarakat tentang kewajiban perpajakan tergolong rendah	- Sosialisasi pajak -
			Penggunaan aplikasi pengelolaan pendapatan dan pengelolaan barang milik daerah yang bersifat parsial	- Integrasi aplikasi agar lebih efekt Tersediany a aplikasi

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tabel Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Uraian	Satuan	Kondisi Awal	Target
					2023	2025
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Efektivitas Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Persentase Capaian Kinerja keuangan dan barang milik daerah	%	77.29	100.00
		Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Rasio pendapatan asli daerah terhadapat total pendapatan daerah dalam APBD	%	3.12	4.5

- Telaan terhadap RPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025

Berikut beberapa tujuan RPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 – 2026 yaitu :

- Tujuan dan Sasaran RPD :

  Tujuan dan Sasaran pembangunan pada RPD Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 – 2026 yaitu :

  (1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial

  Sasaran :

  1. Meningkatnya kualitas dan daya saing Pendidikan
  2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
  3. Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

4. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
5. Menurunya Tingkat Pengangguran Terbuka

(2) Meningkatkannya Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran :

1. Meningkatkannya Produksi Pertanian
2. Meningkatnya Populasi dan Produksi Ternak
3. Meningkatnya Ketahanan Pangan
4. Meningkatkannya Produksi Perikanan
5. Meningkatknya Sektor Perdagangan dan Perindustrian
6. Meningkatnya Sektor UMKM dan Koperasi
7. Meningkatkannya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal
8. Meningkatkannya Investasi
9. Pengembangan Potensi Desa

(3) Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan

Sasaran :

1. meningkatnya kualitas infrastruktur public
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah
3. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana

(4) Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang dinamis, inovatif dan berireintasi pelayanan

Sasaran :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Efektivitas Pemerintahan
2. Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik
3. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta keharmonisan Masyarakat

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Keuangan memiliki peran penting Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana termuat dalam RPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 – 2026 dalam hal ini terkait dengan Misi ke 4 yakni ***Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang dinamis, inovatif dan berireintasi pelayanan*** dengan Sasaran . ***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Efektivitas Pemerintahan***

Tabel Telaan terhadap RPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Tantangan	Peluang
1	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang dinamis, inovatif dan berireintasi pelayanan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Efektivitas Pemerintahan	Ketersediaan SDM yang belum memadai terutama Penilai Barang Milik Daerah dan Pemeriksa Pajak Daerah	- Tersedianya anggaran untuk Diklat dan Adanya rekrutmen ASN
			Hasil evaluasi kelembagaan, dari dimensi struktur menunjukan desain organisasi yang ada bersifat terlalu kompleks pada program/bidang pengelolaan	- Meningkatkan ketersediaan SDM untuk pengelolaan program pendapatan daerah

			pendapatan daerah	
			Realisasi PAD belum sesuai target	- Pemanfaatan asset daerah yang dapat menghasilkan PAD - Meningkatkan ketersediaan SDM untuk pengelolaan program pendapatan daerah
			Masih terdapat Objek PBB yang belum terdaftar dan Penetapan PBB yang tidak sesuai	- Pendataan ulang objek
			Kepatuhan dan Pengetahuan masyarakat tentang kewajiban perpajakan tergolong rendah	- Sosialisasi pajak -
			Penggunaan aplikasi pengelolaan pendapatan dan pengelolaan	- Integrasi aplikasi agar lebih efekt Tersedianya aplikasi

			barang milik daerah yang bersifat parsial	

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegitan Perangkat Daerah Badan keuangan Daerah memiliki 4 (empat) program yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang dan 3 (tiga) program pendukung kinerja utama.

Program penunnja urusan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sedangkan program pendukung kinerja utama yaitu :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Setiap program berisikan kegiatan dan sub kegiatan, kegiatan berjumlah 13 kegitan dan sub kegiatan berjumlah 95 sub kegiatan.

Penyebaran lokasi program/kegiatan/sub kegiatan tersebar di semua Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur, luar wilayah Kebupaten Manggarai Timur, semua kecamatan , desa/kelurahan dan sebagian besar di desa Gurung Liwut Kec. Borong.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel Rencana Kerja Dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten manggarai Timur
Tahun 2025

(Terlampir)

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 diarahkan pada terwujudnya tatakelola pemerintahan yang dinamis, inovatif dan beroireintasi pelayanan dengan cara meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan dan efektivitas pemerintahanan. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas sasaran yang akan dicapai yakni meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dan meningkatnya kemampuan keuangan daerah

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dilakukan melalui uapaya – upaya: koordinasi dan konsultasi dengan semua sector – sector terkait, penguatan kapasitas pengelola keuangan dan barang milik daerah melalui pembinaan pengelola keuangan dan pengurus barang SKPD, penguatan regulasi bidang keuangan sesuai kebutuhan, dan penyedian pejabat Penilai Barang Milik Daerah, sedangkan terkait dengan meningkatnya kemampuan keua ngan daerah dalam hal ini rasio PAD terhadap total pendapatan daerah dilakukan dengan upaya - upya : penguatan basis data pajak, peningkatan sosialisasi pajak, penguatan sumber daya pengelola pajak. Selain upaya – upaya tersebut diatas secara umum untuk tercapainya tujuan dan sasaran kinerja juga melalui penerapan manajemen risiko dan reformasih birokrasi.

Demikian dokumen Rencana Kinerja disusun kiranya menjadi dasar dan arah pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.

Borong, 5 Juni 2024

